



Membangun Kerukunan di Tengah Perbedaan : Praktik Resolusi Konflik di Tengah Gereja

Barbara Green Winslet Bessie^{1*}, Daud Saleh Luji²

¹⁻²Magister PAK, Pascasarjana, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang, Indonesia

E-mail : barbarabessie687@gmail.com¹, dsalehluji@gmail.com²

Alamat Kampus: Jl. Tajoin Tuan, Naimata, Kec. Maulafa, Kota Kupang

Korespondensi penulis: bessiebarbara434@gmail.com*

Abstract. *The church is called to bring about the harmony and unity of Christ in a divided world. However, internal conflict often arises from theological differences, leadership styles, cultural preferences, and interpersonal issues. Conflict that is not managed wisely can damage the integrity and witness of the church. This study uses a library research method and finds that harmony is an active process that requires dialogue, openness, acceptance, mutual respect, and love. The roots of church conflict are addressed through loving communication (Matthew 18), biblical mediation and negotiation training, cultivating a culture of forgiveness and reconciliation, and transparent and integrity-based leadership. Although challenges such as ego exist, the power of the gospel, the Holy Spirit, and the potential for growth offer great opportunities. A reconciling church is a powerful testimony of Christ's reconciling love.*

Keywords: *Difference, Harmony, Resolution Practice.*

Abstrak. Gereja dipanggil untuk mewujudkan kerukunan dan kesatuan Kristus di dunia yang terpecah belah. Namun, konflik internal sering muncul dari perbedaan teologis, gaya kepemimpinan, preferensi kultural, dan masalah antarpribadi. Konflik yang tidak dikelola secara bijaksana dapat merusak integritas dan kesaksian gereja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dan ditemukan bahwa kerukunan adalah proses aktif yang menuntut dialog, keterbukaan, penerimaan, saling menghargai, dan cinta kasih. Akar konflik gereja diatasi melalui komunikasi berlandaskan kasih (Matius 18), pelatihan mediasi dan negosiasi alkitabiah, penanaman budaya pengampunan dan rekonsiliasi, serta kepemimpinan transparan dan berintegritas. Meskipun tantangan seperti ego ada, kuasa Injil, Roh Kudus, dan potensi pertumbuhan menawarkan peluang besar. Gereja yang berkerukunan menjadi kesaksian kuat kasih Kristus yang mendamaikan.

Kata kunci: Kerukunan, Perbedaan, Praktik Resolusi.

1. LATAR BELAKANG

Gereja sebagai komunitas iman yang dipanggil untuk memmanifestasikan kasih dan kesatuan Kristus, memiliki mandat fundamental untuk mewujudkan kerukunan di tengah dunia yang sarat akan perpecahan. Panggilan ini, yang digemakan dalam doa Yesus agar murid-murid-Nya menjadi satu (Yohanes 17:21) dan seruan Rasul Paulus untuk hidup damai (Efesus 4:3), menjadi semakin relevan di era modern yang ditandai oleh polarisasi. Idealnya, gereja seharusnya menjadi teladan harmonisasi, sebuah tempat di mana perbedaan dirayakan sebagai anugerah, bukan sebagai sumber perselisihan. Namun, realitas menunjukkan bahwa gereja, yang terdiri dari individu-individu yang tidak sempurna, justru seringkali menghadapi konflik internal. Konflik ini dapat muncul dari berbagai sumber, mulai dari perbedaan interpretasi teologis dan doktrinal yang mendalam, gaya kepemimpinan yang bervariasi, preferensi generasional dan kultural dalam ibadah, hingga masalah antarpribadi seperti kesalahpahaman atau gosip, bahkan resistensi

terhadap perubahan dan inovasi dalam pelayanan. Apabila tidak dikelola dengan bijaksana dan berdasarkan prinsip-prinsip Kristen, konflik-konflik ini berpotensi mengikis kerukunan, menimbulkan luka emosional yang mendalam, dan pada akhirnya merusak kesaksian gereja di mata masyarakat.

Mengingat urgensi tersebut, kemampuan gereja untuk secara proaktif mengembangkan dan mengimplementasikan praktik resolusi konflik yang efektif menjadi sangat krusial. Konsep kerukunan sendiri, yang secara etimologis berasal dari bahasa Arab "rukun" (tiang atau dasar), menggarisbawahi bahwa kerukunan bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan sebuah proses aktif yang menuntut dialog, keterbukaan, penerimaan, sikap saling menghargai, dan cinta kasih (Sinaga, 2025). Secara formal, Peraturan Bersama Menteri (PBM) lebih lanjut mendefinisikan kerukunan umat beragama sebagai hubungan yang dilandasi toleransi, saling pengertian, penghormatan, kesetaraan, dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai Pancasila dan UUD 1945. Ini menegaskan bahwa kerukunan adalah "tiang penyangga vital" untuk menjaga kesatuan, identitas, dan integritas bangsa (Hasyim & Junaidi, 2023). Oleh karena itu, tujuan kerukunan untuk mematahkan sekat-sekat suku, agama, ras, dan golongan demi persatuan, serta membangun relasi damai yang saling menghormati menjadi visi yang harus dihayati dan dipraktikkan oleh gereja.

Dalam konteks ini, gereja dipanggil untuk aktif menerapkan prinsip-prinsip kerukunan yang berlandaskan kasih Kristus. Ini mencakup toleransi terhadap perbedaan latar belakang, keterbukaan dalam berinteraksi dengan masyarakat tanpa prasangka, dan inklusivitas dengan merangkul semua lapisan tanpa diskriminasi (Lumbantoruan, 2024). Lebih jauh, gereja harus terlibat dalam keadilan sosial, memberikan pelayanan dan solidaritas, mempromosikan dialog dan komunikasi konstruktif, serta berperan sebagai mediator dan pencipta damai (Simanjuntak, 2022). Peran ini bukan hanya tanggung jawab sosial, melainkan bagian integral dari amanat agung Yesus Kristus untuk membawa "shalom" atau damai di tengah dunia. Tokoh-tokoh Alkitab seperti Daniel dan Paulus telah menunjukkan bahwa hidup dalam kemajemukan tidak menghalangi seseorang untuk menjadi pembawa damai yang berintegritas (Emiyati et al., 2023). Mengingat konflik dapat mengancam integritas gereja, mengikis kesaksiannya, dan menghambat pertumbuhan rohani jemaat, jurnal ini akan secara khusus mengeksplorasi bagaimana gereja dapat mengimplementasikan praktik resolusi konflik yang efektif dan berlandaskan Alkitab untuk membangun dan memelihara kerukunan yang sejati di tengah segala perbedaan yang ada.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerukunan Multikultural

Kerukunan dalam konteks Kristen dipahami sebagai manifestasi dari konsep *koinonia* (persekutuan) yang berlandaskan pada kesatuan di dalam Kristus. Kerukunan umat beragama ditinjau dari perspektif Alkitab mengacu pada prinsip-prinsip fundamental yang diajarkan dalam Kitab Suci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian antarumat beragama (Lumbanraja, 2022). Teori ini menekankan bahwa kerukunan bukanlah sekadar toleransi pasif, melainkan bentuk persekutuan aktif yang didasarkan pada kasih Kristus yang mendamaikan (2 Korintus 5:18-19). Dalam perspektif ini, kerukunan melampaui batas-batas denominasional dan bahkan lintas agama, karena didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar Allah (*imago Dei*).

Kerukunan antar umat beragama dari sudut pandang iman Kristen menunjukkan bahwa kerukunan dapat terwujud melalui dialog yang jujur, terbuka, dan saling menghargai. Dalam pandangan ini, kerukunan dipahami sebagai proses dialog yang berkelanjutan, di mana setiap pihak dapat mempertahankan identitas iman mereka sambil terlibat dalam komunikasi yang berarti dengan tradisi iman lainnya. Dialog yang konstruktif ini tidak bertujuan untuk menciptakan sinkretisme, melainkan untuk membangun ruang hidup bersama yang harmonis dalam perbedaan (Pertumbuhan et al., 2024).

Konsep kerukunan dalam konteks multikulturalisme gereja telah berkembang menjadi paradigma teologis yang signifikan dalam kehidupan menggereja kontemporer. Multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama maupun keragaman bentuk kehidupan yang terus bermunculan, sementara gereja sebagai kehidupan bersama (*persekutuan-koinonia*) tidak lepas dari realitas keragaman (*multikulturalitas*). Dalam perspektif teologi multikultural, kerukunan bukan sekadar koeksistensi pasif melainkan bentuk harmoni aktif yang mengakui perbedaan sebagai anugerah ilahi. Kerukunan ini mencakup saling menghormati, toleransi, dan kerjasama antara individu-individu dengan latar belakang keagamaan yang berbeda. Konsep ini melampaui paradigma tradisional tentang kesatuan gereja yang seragam menuju apresiasi terhadap keberagaman sebagai refleksi kekayaan ciptaan Allah, di mana setiap budaya dan tradisi membawa kontribusi unik dalam pemahaman akan kebenaran ilahi (Nurdin, 2019).

Implementasi Kerukunan Melalui Dialog Antarumat Beragama

Dialog antarumat beragama menjadi instrumen vital dalam mewujudkan kerukunan di tengah pluralitas masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks pelayanan gereja. Dialog antar agama merupakan konsep perdamaian yang bagus, yang bisa dilakukan dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia, karena dalam dialog antar agama tersebut, antar umat beragama dituntut untuk bisa saling memahami dan menghormati keyakinannya masing-masing. Praktik dialog ini tidak bertujuan untuk sinkretisme atau relativisme teologis, melainkan untuk membangun jembatan komunikasi yang memungkinkan setiap komunitas faith untuk berbagi nilai-nilai universal kemanusiaan. Dialog merupakan suatu tindakan yang mendasar dalam sebuah interaksi yaitu dengan cara berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain bertemu. Dalam konteks gereja, dialog antarumat beragama memperkuat identitas Kristiani sambil membuka ruang untuk apresiasi terhadap wisdom tradisi lain, menciptakan ekosistem kerukunan yang berkelanjutan di tingkat *grassroot* (Sila, 2017).

Dinamika Konflik dan Strategi Resolusi dalam Konteks Gereja

Konflik dalam kehidupan gereja merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola melalui pendekatan resolusi yang alkitabiah dan kontekstual. Adanya perbedaan pendapat antara para pemimpin, antara pemimpin dan pengikut, atau antara pengikut, bisa menimbulkan konflik. Dengan keniscayaan itu berarti terjadinya konflik tidak bisa dihindari melainkan harus diselesaikan. Resolusi konflik dalam konteks gereja memerlukan pendekatan yang holistik, menggabungkan prinsip-prinsip teologis dengan metode praktis penyelesaian sengketa. Resolusi konflik menjadi suatu bagian alat untuk mempersatukan antar-umat beragama dengan jalan cara mendamaikan melalui berbagai pendekatan baik secara akademisi atau melalui solusi praktisi. Strategi resolusi ini mencakup pendekatan preventif melalui komunikasi terbuka, mediatif melalui dialog konstruktif, dan kuratif melalui proses rekonsiliasi yang berlandaskan pengampunan. Efektivitas resolusi konflik bergantung pada kemampuan komunitas gereja untuk menerapkan prinsip-prinsip kristiani dalam mengelola perbedaan, mengubah potensi perpecahan menjadi peluang pertumbuhan spiritual dan relasional (Lelono, 2022).

Peran Kepemimpinan Pastoral dalam Memfasilitasi Kerukunan

Kepemimpinan pastoral memainkan peran sentral dalam menciptakan dan memelihara kerukunan di tengah keberagaman jemaat melalui pendekatan yang transformatif dan inklusif. Kepemimpinan pastoral dalam mengelola konflik jemaat di gereja lokal memerlukan insights dari passage alkitabiah yang relevan, khususnya dalam konteks pelayanan yang melibatkan komunitas multikultural. Peran kepemimpinan Kristen dalam membangun dialog antar umat beragama menuntut kemampuan untuk menjadi bridge-builder yang menghubungkan berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda. Kepemimpinan yang efektif dalam konteks ini bercirikan kemampuan untuk mendengarkan secara empatik, memfasilitasi dialog yang konstruktif, dan menciptakan visi bersama yang melampaui perbedaan partikular. Pemimpin pastoral yang berhasil adalah mereka yang mampu mengintegrasikan kearifan teologis dengan sensitivitas budaya, menciptakan lingkungan gereja yang menjadi model kerukunan bagi masyarakat luas (Sugiyana, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penulis menerapkan metode penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif. Ini berarti peneliti tidak terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, melainkan berfokus pada pengumpulan dan penelaahan sumber data yang sudah ada, seperti buku dan artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian (Batubara, 2022). Metode kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan bahan kajian yang sudah dipublikasikan, seperti buku dan artikel jurnal, untuk mengumpulkan data. Data-data ini kemudian dinarasikan secara sistematis untuk mendukung judul penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian kepustakaan, peneliti harus mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik penelitian, lalu menganalisisnya secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang akurat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kerukunan dan Harmoni dalam Multikulturalisme

Sebagai sebuah konsep, multikulturalisme menggambarkan persepsi seseorang tentang keragaman hidup di dunia, atau sebagai suatu kebijakan budaya yang mendorong penerimaan terhadap realitas keberagaman budaya. Ini mencakup pengakuan terhadap berbagai nilai, sistem, adat istiadat, dan orientasi politik yang melekat dalam masyarakat. Konsep kerukunan dan harmoni dalam masyarakat multikultural adalah fondasi krusial bagi stabilitas dan kemajuan suatu bangsa. Masyarakat multikultural dicirikan oleh

keberadaan beragam kelompok dengan latar belakang etnis, budaya, agama, dan pandangan hidup yang berbeda-beda (Nurdin, 2019). Di tengah perbedaan ini, kerukunan bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan sebuah kondisi aktif di mana individu dan kelompok mampu hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Ini mengandaikan adanya penerimaan terhadap perbedaan sebagai keniscayaan, bukan sebagai ancaman, dan kemauan untuk berinteraksi secara konstruktif meskipun memiliki identitas yang berlainan. Dalam konteks ini, harmoni melampaui kerukunan pasif. Harmoni mengacu pada kondisi di mana berbagai elemen yang berbeda tidak hanya hidup berdampingan tanpa konflik, tetapi juga saling melengkapi dan menciptakan keselarasan yang lebih besar. Ini seperti orkestra di mana setiap instrumen memainkan bagiannya sendiri, namun bersama-sama menghasilkan musik yang indah. Dalam masyarakat multikultural, harmoni berarti bahwa perbedaan-perbedaan yang ada justru menjadi sumber kekuatan, kekayaan, dan inovasi. Ini terwujud melalui dialog yang jujur dan terbuka, di mana setiap suara didengar dan dihargai, serta melalui kerja sama lintas batas yang menghasilkan solusi-solusi kreatif untuk tantangan bersama (Hadijaya et al., 2024).

Salah satu praktik konkret dalam membangun kerukunan dalam pluralisme adalah melalui dialog antarumat beragama. Dialog ini bukan bertujuan untuk menyamakan keyakinan atau mencari titik lebur doktrin, melainkan untuk membangun saling pengertian, menghilangkan prasangka, dan menemukan titik temu dalam nilai-nilai kemanusiaan universal. Melalui dialog, pihak-pihak yang berbeda dapat belajar tentang praktik, tradisi, dan perspektif spiritual satu sama lain, yang seringkali memperkaya pemahaman mereka tentang diri sendiri dan iman mereka. Pengalaman berdialog secara positif ini dapat membentuk sikap yang lebih terbuka dan inklusif di dalam gereja, membantu jemaat untuk memahami bagaimana perbedaan bisa menjadi sumber kekuatan, bukan perpecahan (Emiyati et al., 2023).

Esensi Kerukunan Beragama

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah dari bahasa Arab, yakni “rukun” yang berarti tiang, dasar atau sila. Kerukunan ini menggambarkan proses untuk mencapai kerukunan dan kemauan untuk hidup berdampingan secara damai. Untuk mencapai kerukunan seperti itu maka sangat diperlukan adanya proses atau langkah yang ditempuh yakni adanya dialog, saling terbuka, menerima, menghargai sesama serta memiliki cinta kasih (Artis, 2021). Nilai kerukunan hidup antarumat beragama dipandang

dari aspek sosial budaya yang sangat sentral dan sangat penting bagi kesatuan bangsa untuk menjadi perekat yang handal. Solidaritas, kerjasama serta kerukunan diperlukan agar terciptanya kedamaian, ketentraman dan bersatu dalam keberagaman dalam upaya membangun masa depan bangsa dan Negara (Sinaga, 2025).

Sebagaimana dikutip dari Peraturan Bersama Menteri (PBM) bahwa Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana individu dari berbagai keyakinan hidup berdampingan. Hubungan ini didasari oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati, penghargaan terhadap kesetaraan dalam praktik keagamaan, serta kerja sama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Esensi kerukunan adalah tiang penyanggah dalam menjaga dan memelihara kesatuan, identitas dan integritas bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga esensi kerukunan adalah saling mengakui dan menghargai orang lain baik yang berbeda iman maupun berbeda aliran (Hasyim & Junaidi, 2023).

Tujuan Kerukunan Beragama

Tujuan kerukunan mematahkan pengkotak-kotakan antar suku, agama, ras dan golongan demi kesatuan dan persatuan. Lubis menyebut bahwa tujuan kerukunan beragama adalah untuk membangun relasi yang damai dan bersahabat dengan pemeluk agama lainnya sehingga tujuan akhirnya adalah menghormati, menghargai dan mendukung keberadaan umat lain yang meyakini ajaran agamanya (Rusydi & Zolehah, 2021). Kerukunan bertujuan memanusiakan manusia sehingga mampu membedakan antara yang benar dan salah. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama dapat berjalan secara harmonis, sehingga bangsa dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dengan beberapa tujuan kerukunan hidup yaitu Meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagaman masing-masing pemeluk agama, Untuk meningkatkan stabilitas nasional yang mantap, dengan terwujudnya kerukunan dan terkikisnya nilai pertikaian dan perbedaan dalam keanekaragaman, Menunjang dan mensukseskan pembangunan, untuk memakmurkan dan mensejahterahkan kehidupan mencapai kebahagiaan dalam segala bidang serta Memelihara dan mempererat tali persaudaraan dalam rasa kebersamaan yang baik untuk kesatuan dan keutuhan masyarakat dalam bangsa dan Negara Indonesia (Naibaho, 2024).

Prinsip-Prinsip Kerukunan Gereja Yang Ditengah-Tengah Masyarakat

Toleransi adalah fondasi penting yang menekankan penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan. Gereja diharapkan menjadi ruang yang terbuka dan ramah bagi individu dari beragam latar belakang agama, budaya, dan pandangan hidup. Keterbukaan berarti gereja secara aktif berinteraksi dengan masyarakat sekitar tanpa prasangka. Dengan bersikap terbuka, gereja dapat lebih efektif dalam menanggapi kebutuhan dan aspirasi komunitasnya (Fitri Handayani et al., 2022). Prinsip inklusivitas menekankan bahwa gereja harus melibatkan semua lapisan masyarakat dalam kegiatan dan programnya, tanpa diskriminasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang menyeluruh dan menyambut bagi siapa saja. Sementara itu, keadilan sosial adalah prinsip yang menegaskan peran gereja dalam mempromosikan keadilan di masyarakat. Ini mencakup dukungan terhadap upaya-upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan (Lumbantoruan, 2024).

Gereja diharapkan untuk memahami dan menghargai keberagaman sebagai anugerah. Gereja juga harus aktif dalam pelayanan dan solidaritas, baik kepada masyarakat maupun di antara anggotanya, serta dengan komunitas sekitar. Dialog dan komunikasi yang terbuka dan konstruktif adalah kunci untuk membangun saling pengertian antara gereja dan masyarakat, menjadikan gereja sebagai mediator yang menyatukan berbagai kelompok. Selain itu, gereja memiliki peran dalam penciptaan damai di masyarakat, baik melalui pencegahan konflik, mediasi, maupun dukungan inisiatif perdamaian. Terakhir, gereja diharapkan dapat memberdayakan komunitas melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan ekonomi, sehingga masyarakat dapat lebih mandiri (Simanjuntak, 2022).

Konflik dan Resolusi Konflik

Konflik kerap kali berakar dari hal-hal kecil seperti perbedaan sikap, pandangan, atau kurangnya toleransi terhadap orang lain. Meski tampak remeh pada awalnya, masalah-masalah ini dapat membesar menjadi perselisihan serius jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu, penanganan konflik sejak dini sangat krusial untuk mencegahnya mengganggu dinamika komunitas. Menariknya, konflik yang dikelola secara tepat dapat menjadi pendorong perubahan dan inovasi, membuka jalan bagi ide-ide baru serta solusi kreatif. Ini juga berpotensi meningkatkan kolaborasi, memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berbagi pemikiran, menemukan resolusi bersama, dan saling memahami lebih dalam (Khovivah et al., 2024).

Resolusi konflik didefinisikan sebagai upaya penanganan penyebab-penyebab konflik guna membentuk kembali hubungan yang berkelanjutan antara kelompok-kelompok yang terlibat perselisihan. Secara fundamental, ini merupakan cara penyelesaian masalah antarpribadi yang bersifat sukarela. Konsep resolusi konflik juga menekankan penggunaan pendekatan yang lebih demokratis dan konstruktif, yaitu dengan memfasilitasi pihak-pihak yang berkonflik untuk secara mandiri menyelesaikan isu-isu mereka, atau dengan melibatkan mediator ketiga yang memiliki kapasitas kebijaksanaan, netralitas, dan keadilan (Sudarnoto, 2021). Secara esensial, resolusi konflik adalah cara yang sukarela bagi individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi dengan orang lain. Pendekatan ini menganjurkan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif dalam penyelesaian konflik. Hal ini berarti memberikan kesempatan penuh kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka sendiri, dengan dukungan penuh untuk mencapai kesepakatan. Namun, dalam banyak kasus, proses ini juga dapat melibatkan pihak ketiga yang bijaksana, netral, dan adil untuk bertindak sebagai fasilitator atau mediator. Peran pihak ketiga ini adalah membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam proses identifikasi masalah, eksplorasi opsi, dan perumusan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga tercipta perdamaian yang lestari dan bukan hanya gencatan senjata sementara (Sabiruddin, 2024).

Mengajarkan Pentingnya Hidup dalam Perdamaian

Peran gereja dalam mengajarkan perdamaian bukanlah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Alkitab menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk tidak hanya berdiam diri, melainkan untuk keluar dan berkarya. Keberadaan gereja di tengah masyarakat yang majemuk bukanlah suatu kebetulan; ini adalah bagian dari amanat agung Yesus Kristus, sebuah misi khusus yang menjadi tanggung jawab gereja (Agreis, 2023). Selain memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, misi penting lain yang harus diemban gereja adalah membawa damai di tengah dunia. Perbedaan dalam masyarakat majemuk sama sekali bukan alasan bagi gereja untuk tidak berperan dalam menyebarkan ajaran perdamaian. Bahkan, Alkitab sendiri telah menunjukkan banyak tokoh yang hidup dalam kemajemukan namun berhasil menjadi pembawa damai (Emiyati et al., 2023).

Sama seperti Daniel yang tidak terhalangi oleh perbedaan keyakinan dan budaya untuk tetap menjadi pembeda yang benar, hidup dalam perdamaian dan kebenaran, demikian pula Paulus dan tokoh Alkitab lainnya. Oleh karena itu, gereja saat ini harus

mampu menjadi pembeda yang benar dan hidup dalam perdamaian. Dengan demikian, sangatlah penting bagi gereja untuk mengajarkan setiap generasi agar senantiasa hidup dalam perdamaian. Kehadiran gereja di Indonesia bukan sebagai penentang negara, melainkan sebagai rekan yang memiliki tanggung jawab sosial untuk menyampaikan shalom (damai sejahtera) kepada semua orang (Setiadi, 2013). Semua orang merindukan kedamaian dalam hidupnya karena dengan adanya kedamaian maka manusia merasakan kebebasan sebagai ciptaan Tuhan dalam membangun hidup bersama dengan damai dan rukun serta memiliki solidaritas antara sesama baik dalam keluarga maupun dengan orang lain (Kharisma et al., 2024).

Akar-akar Konflik dalam Konteks Gereja

Konflik dalam gereja dapat muncul dari berbagai sumber, seringkali berlapis dan kompleks (Keliata & Trinaila, 2023). Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Perbedaan Interpretasi Teologis dan Doktrinal

Meskipun ada keyakinan inti yang mempersatukan, perbedaan pandangan mengenai doktrin sekunder (misalnya, eskatologi, karunia rohani, tata gereja, praktik ibadah) dapat memicu perdebatan sengit jika tidak ditangani dengan kerendahan hati dan saling menghormati

b. Gaya Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

Konflik dapat muncul dari gaya kepemimpinan yang otoriter atau pasif, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, atau ketidakjelasan peran dan tanggung jawab.

c. Perbedaan Generasi dan Preferensi Kultural

Jemaat yang beragam secara usia dan latar belakang budaya sering memiliki preferensi berbeda dalam musik, gaya ibadah, atau program gereja, yang jika tidak diakomodasi dapat menimbulkan gesekan.

d. Masalah Antarpribadi

Kesalahpahaman, gosip, dendam pribadi, atau persaingan antarindividu atau kelompok kecil dapat dengan cepat menyebar dan merusak kerukunan seluruh jemaat.

e. Perubahan dan Inovasi

Setiap rencana perubahan, baik dalam struktur, visi, atau pelayanan gereja, dapat memicu resistensi dan konflik dari mereka yang merasa terancam atau tidak nyaman dengan hal baru.

f. Masalah Keuangan dan Sumber Daya

Perselisihan mengenai alokasi dana, prioritas pengeluaran, atau transparansi keuangan gereja dapat menjadi sumber konflik yang signifikan (Grenz, 2022).

Praktik Resolusi Konflik untuk Membangun Kerukunan di Gereja

Membangun kerukunan di tengah perbedaan membutuhkan pendekatan yang disengaja, terstruktur, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip alkitabiah. Pertama, gereja perlu mengembangkan komunikasi yang berlandaskan kasih. Ini melibatkan pendidikan jemaat untuk menerapkan Prinsip Matius 18 mendekati pihak yang bersalah secara pribadi, melibatkan dua atau tiga saksi jika perlu, dan membawa masalah ke komunitas gereja sebagai upaya terakhir. Jemaat juga harus dilatih untuk mendengarkan secara aktif dan berempati, berupaya memahami perspektif dan perasaan orang lain tanpa menghakimi. Penting pula untuk berbicara kebenaran dalam kasih (Efesus 4:15), menyatakan perasaan dengan jujur tetapi dengan hormat, serta menghindari gosip dan fitnah yang merusak (Takaria, 2020). Kedua, gereja harus melatih keterampilan mediasi dan negosiasi alkitabiah. Ini bisa dilakukan dengan melatih mediator internal dari anggota jemaat atau pemimpin yang bijaksana, yang dapat memfasilitasi dialog dan mengarahkan pihak-pihak yang berselisih kepada solusi alkitabiah. Gereja juga perlu mengajarkan proses negosiasi berbasis prinsip, di mana tujuannya adalah mencari solusi "menang-menang" yang memuliakan Tuhan, bukan untuk mengalahkan pihak lain. Penting juga untuk menyediakan fasilitasi diskusi terbuka yang aman bagi isu-isu sensitive (Lamak & X, 2024). Ketiga, sangat penting untuk menanamkan budaya pengampunan dan rekonsiliasi. Ini dilakukan melalui pengajaran yang berkesinambungan tentang pentingnya pengampunan (Kolose 3:13) dan rekonsiliasi (2 Korintus 5:18-19). Gereja dapat mempertimbangkan praktik pengakuan dan absolusi untuk memupuk kerendahan hati. Konseling pastoral juga perlu disediakan untuk membantu individu mengatasi luka dan kepahitan. Terakhir, perayaan rekonsiliasi dapat diadakan setelah konflik besar diselesaikan untuk memperkuat ikatan kerukunan. Kepemimpinan yang transparan dan berintegritas sangat krusial. Para pemimpin harus menjadi teladan hidup dalam mengelola konflik pribadi dan kolektif, menunjukkan kerendahan hati dan kemauan untuk meminta maaf. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam pengelolaan gereja dapat mengurangi kecurigaan. Pemimpin juga harus secara aktif membangun visi bersama yang berpusat pada Kristus, yang dapat menyatukan jemaat di tengah perbedaan minor (Ulum & Utami, 2022).

Kepemimpinan Gereja dalam Resolusi Konflik

Kepemimpinan gereja memegang peranan sentral dalam mengelola dan menyelesaikan konflik internal. Kehadiran pemimpin yang cakap, berintegritas, dan berlandaskan prinsip Alkitab dapat mengubah potensi perpecahan menjadi kesempatan bagi pertumbuhan dan pendewasaan jemaat. Sebaliknya, kepemimpinan yang abai atau tidak efektif dalam menangani konflik justru bisa memperparah situasi dan merusak kesaksian gereja (Rupa, 2016).

Beberapa aspek kunci kepemimpinan gereja dalam resolusi konflik meliputi:

a) Membangun Budaya Gereja yang Sehat dan Pro-Resolusi

Pemimpin gereja bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan di mana dialog terbuka, kejujuran, dan kerentanan diterima dan didorong. Ini berarti :

- 1) **Membangun Kepercayaan:** Pemimpin harus menjadi teladan integritas, konsistensi, dan empati, sehingga jemaat merasa aman untuk mengungkapkan perbedaan pendapat atau masalah tanpa takut dihakimi atau dihukum.
- 2) **Mendorong Komunikasi Konstruktif:** Mengajarkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi dasar seperti mendengarkan aktif, berbicara kebenaran dalam kasih (Efesus 4:15), dan menghindari gosip.
- 3) **Menanamkan Visi Bersama:** Mengarahkan fokus jemaat pada visi Kristus yang mempersatukan, melampaui perbedaan-perbedaan minor. Konflik seringkali muncul ketika ada ketidakjelasan atau perbedaan visi antaranggota atau kelompok.

b) Peran Pemimpin sebagai Mediator dan Fasilitator

Ketika konflik muncul, pemimpin seringkali harus berperan sebagai mediator atau fasilitator. Ini membutuhkan keterampilan khusus:

- 1) **Objektivitas dan Netralitas:** Pemimpin harus mampu menempatkan diri di atas kepentingan pribadi atau kelompok, fokus pada keadilan dan kebenaran Alkitabiah.
- 2) **Keterampilan Mendengar Empati:** Memahami perspektif dan perasaan semua pihak yang terlibat, membantu mereka merasa didengar dan divalidasi.
- 3) **Fasilitasi Dialog:** Memandu percakapan yang sulit, menjaga agar tetap produktif, dan membantu pihak-pihak yang berselisih menemukan solusi bersama. Pemimpin bisa menggunakan prinsip negosiasi berbasis prinsip, di mana fokusnya adalah mencari "menang-menang" daripada "menang-kalah".

- 4) Pengetahuan Alkitabiah: Menerapkan prinsip-prinsip Alkitab seperti Matius 18 (pendekatan pribadi, melibatkan saksi, membawa ke komunitas), Galatia 6:1 (memulihkan dengan lemah lembut), dan Filipi 2:3-4 (merendahkan diri dan memperhatikan kepentingan orang lain).

c) Kepemimpinan Transformatif dan Adaptif

Konflik dapat menjadi katalis untuk perubahan dan pertumbuhan. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang dapat melihat potensi ini:

- 1) Melihat Konflik sebagai Peluang: Pemimpin harus memiliki perspektif bahwa konflik, jika dikelola dengan baik, dapat memperdalam pemahaman jemaat tentang kasih, pengampunan, dan anugerah Allah, serta memperkuat ikatan komunitas.
- 2) Kemampuan Adaptasi: Konflik seringkali memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Pemimpin harus adaptif dalam strategi resolusi, tergantung pada sifat dan tingkat keparahan konflik.
- 3) Mengajar dan Melatih Jemaat: Pemimpin tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga melatih jemaat untuk memiliki keterampilan resolusi konflik sendiri, memberdayakan mereka untuk menjadi pembawa damai dalam kehidupan sehari-hari (Emiyati et al., 2023).

d) Akuntabilitas dan Keteladanan Pemimpin

Dalam hal Integritas pemimpin adalah fondasi. Pemimpin harus melakukan beberapa hal berikut :

- 1) Menjadi Teladan Rekonsiliasi: Pemimpin harus bersedia mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mencari pengampunan ketika mereka menjadi bagian dari masalah atau menyebabkan konflik.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Terutama dalam masalah-masalah yang sering menjadi akar konflik seperti keuangan atau pengambilan keputusan. Transparansi mengurangi kecurigaan dan membangun kepercayaan.
- 3) Kesiapan untuk Menegakkan Disiplin Gereja: Jika konflik melibatkan dosa yang jelas dan tidak ada pertobatan, pemimpin harus berani menerapkan disiplin gereja sesuai prinsip Alkitabiah, dengan tujuan akhir pemulihan (Putra et al., 2023).

Tantangan dan Peluang

Meskipun vital, membangun kerukunan melalui resolusi konflik di gereja menghadapi tantangan. Ego dan dosa yang mengakar seringkali menjadi penghalang terbesar, karena sulit bagi individu untuk melepaskan ego mereka dan mengakui kesalahan. Kurangnya pendidikan dan keterampilan dalam komunikasi konflik atau mediasi juga menjadi kendala. Luka masa lalu yang belum sembuh dari konflik sebelumnya dapat menghambat upaya rekonsiliasi di masa kini. Selain itu, pengaruh budaya sekuler yang mempromosikan konfrontasi agresif atau penghindaran konflik dapat memengaruhi bagaimana jemaat merespons perbedaan (Sabiruddin, 2024).

Namun, di balik tantangan ini, ada peluang besar. Kuasa Injil yang transformatif mampu mengubah hati yang paling keras sekalipun dan memungkinkan pengampunan radikal. Roh Kudus memberdayakan jemaat untuk hidup dalam damai dan kasih. Potensi pertumbuhan dan kedewasaan dapat muncul dari konflik yang dikelola dengan baik, memperdalam pemahaman tentang kasih dan anugerah Allah. Akhirnya, kesaksian yang kuat bagi dunia adalah hasil dari gereja yang mampu menampilkan kerukunan di tengah perbedaan, menunjukkan kasih dan kuasa Kristus yang mendamaikan (Astuti & Hardoko, 2021).

5. KESIMPULAN

Membangun kerukunan di tengah perbedaan adalah mandat ilahi dan praktis bagi gereja, sebuah komunitas yang dipanggil untuk memmanifestasikan kesatuan Kristus di dunia yang terfragmentasi. Meskipun idealnya gereja mencerminkan harmoni, realitanya, konflik internal sering muncul dari beragam sumber: mulai dari perbedaan teologis, gaya kepemimpinan, preferensi generasional dan kultural, masalah antarpribadi, hingga resistensi terhadap perubahan. Konflik yang tidak ditangani secara efektif dapat mengikis kerukunan, merusak relasi, dan menghambat misi gereja. Oleh karena itu, gereja harus secara proaktif mengimplementasikan praktik resolusi konflik yang berakar pada prinsip-prinsip alkitabiah. Ini berarti mengembangkan komunikasi yang berlandaskan kasih, yang menekankan pendekatan personal sesuai Matius 18, mendengarkan secara aktif dan berempati, serta berbicara kebenaran dalam kasih (Efesus 4:15) sambil menghindari gosip. Gereja juga perlu melatih keterampilan mediasi dan negosiasi alkitabiah, menciptakan pemimpin yang bijaksana sebagai mediator internal dan mendorong pencarian solusi "menang-menang" yang memuliakan Tuhan. Kunci lainnya adalah menanamkan budaya pengampunan dan rekonsiliasi melalui pengajaran yang konsisten, praktik pengakuan

dosa, dan dukungan konseling pastoral. Terakhir, kepemimpinan yang transparan dan berintegritas sangat krusial; para pemimpin harus menjadi teladan dalam mengelola konflik, menunjukkan akuntabilitas, dan secara aktif memupuk visi bersama yang mempersatukan jemaat. Meski gereja mungkin menghadapi tantangan seperti ego, kurangnya keterampilan, luka masa lalu, dan pengaruh budaya sekuler, terdapat peluang besar melalui kuasa Injil, bimbingan Roh Kudus, dan potensi pertumbuhan dari konflik yang dikelola secara konstruktif. Pada akhirnya, gereja yang mampu menunjukkan kerukunan sejati di tengah perbedaan tidak hanya memenuhi panggilannya, tetapi juga menjadi kesaksian hidup yang kuat akan kasih Kristus yang mendamaikan bagi dunia

DAFTAR REFERENSI

- Agreis. (2023). Pemahaman tentang perdamaian menurut ajaran Yesus dalam realitas bermasyarakat. *Institut Agama Kristen Negeri Toraja*, 1(2), 1–7.
- Artis. (2021). *Pembelajaran kontekstual: Konsep dan aplikasi esensi kerukunan*. Riau: UIN Suska Riau.
- Astuti, L. I., & Hardoko, A. (2021). The study of the implementation of the values of religious tolerance in heterogeneous societies. *Jurnal Unmul Civic Education*, 1–8.
- Batubara, H. (2022). Analisis perencanaan anggaran pendapatan belanja pendidikan. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 258–269. <https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i3.169>
- Emiyati, A., Mardin, J., & Ricard, R. (2023). Peran gereja dalam mengajarkan perdamaian di tengah masyarakat majemuk. *Didache: Journal of Christian Education*, 4(2), 149–165. <https://doi.org/10.46445/djce.v4i2.649>
- Grenz, S. J. (2022). *Theology for the community of God*.
- Hadijaya, Y., Fahrezi, M., Intan, N., Wasiyem, Zakiyah, N., & Azhari, M. T. (2024). Konsep multikulturalisme dan pluralisme dalam pendidikan. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3101–3108. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3790>
- Handayani, F., Harahap, H., & Dalimunthe, S. Y. (2022). Perdamaian dalam masyarakat global. *Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(2), 62–71. <https://doi.org/10.51903/education.v2i2.136>
- Hasyim, F., & Junaidi. (2023). Penguatan moderasi beragama sebagai upaya pencegahan radikalisme dan intoleransi pelajar di Karesidenan Surakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.36722/jpm.v6i1.2141>
- Keliata, M., & Trinaila, P. (2023). Pendekatan resolusi konflik di era digital: Strategi untuk lembaga pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 55–69. <https://doi.org/10.47945/Al-Mumtaz.v1i2.xx>

- Kharisma, N., Dwi, N., Kutsyah, F., Zuhriyah, S. A., Kamilah, R., & Alimin, M. (2024). Literatur riview tantangan dan strategi implementasi resolusi dalam konflik global. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 143–158.
- Khovivah, W. V., Sholehah, M., Saleh, M. A., & Jamilah, A. U. (2024). Definisi konflik dan pentingnya manajemen konflik dalam pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia. *Jurnal Master Manajemen*, 2(4), 40–51.
- Lamak, Y. L., & Instansakti, P. X. (2024). Keterlibatan gereja dalam membangun nilai-nilai kesusilaan di tengah masyarakat majemuk Sekolah Tinggi Pastoral IPI Malang. *Jutipa: Jurnal Teologi Injili dan Pendidikan Agama*, 2(1), 183–190.
- Lelono, M. J. (2022). *Jalan bersama: Dialog bagi Gereja Katolik hari ini*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Lumbanraja, D. T. S. (2022). Kerukunan umat beragama ditinjau dari perspektif Alkitab dan implementasinya bagi mahasiswa Kristen di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. *Danum Pabelum: Jurnal Teologi dan Musik Gereja*, 2(1). <https://doi.org/10.54170/dp.v2i1.97>
- Lumbantoruan, T. P. (2024). Menjalin kerukunan perbedaan gereja di tengah-tengah masyarakat pada masa kini di Desa Parhorboan, Kecamatan Pagaran. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 204–214.
- Naibaho, S. P. (2024). Membangun kerukunan antar umat beragama agar terciptanya perdamaian di tengah-tengah masyarakat pada masa kini. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 111–122.
- Nurdin, M. A. (2019). Kajian multikulturalisme dan kaitannya dengan kerukunan. *Jurnal Refleksi*, 18(1), 155–164.
- Pertumbuhan, B., Iman Umat, T. D., Sababalat, L., & Novalina, M. (2024). Peran teologi sistematika bagi pertumbuhan iman umat Kristen. *Nabisuk: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 2(1), 1–17.
- Putra, J. S., Hutabarat, C., & Budiyanto, H. (2023). Kepemimpinan pastoral dalam mengelola konflik jemaat di gereja lokal berdasarkan Markus 10:41–45. *RERUM: Journal of Biblical Practice*, 2(2), 89–107. <https://doi.org/10.55076/rerum.v2i2.144>
- Rupa, C. (2016). Kepemimpinan dan manajemen konflik gereja lokal. *Jurnal Kamarampasan*, 1, 1–10.
- Rusydi, I., & Zolehah, S. (2021). Makna kerukunan antar umat beragama dalam konteks keislaman dan keindonesian. *Journal for Islamic Studies*, 1(1), 170–181. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161580>
- Sabiruddin. (2024). The challenges of conflict resolution in efforts to achieve peace in Syria. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1), 59–74.
- Setiadi. (2013). *Pengantar sosiologi pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: Teori, aplikasi dan pemecahannya*. Jakarta: Prenada Media.

- Sila, M. A. (2017). Kerukunan umat beragama di Indonesia: Mengelola keragaman dari dalam. Dalam *Kebebasan, toleransi dan terorisme: Riset dan kebijakan agama di Indonesia*.
- Simanjuntak, F. (2022). Implementasi peran pemimpin agama Kristen dalam memelihara kerukunan antar umat beragama di Jakarta. *JMAS (Journal Pengabdian Masyarakat)*, 1(3), 469–474.
- Simanjuntak, H. B. (2022). Praktek euthanasia: Suatu studi ditinjau dari sudut etika Kristen. *Teologi*.
- Sinaga, A. V. (2025). Kerukunan beragama di tengah perbedaan agama-agama dan moderasi beragama: Sebuah perspektif teologis. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 6(1), 45–66.
- Sudarnoto, W. (2021). Konflik dan resolusi. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2236>
- Sugiyana, F. X. (2023). *Sinergi energi sinodalitas gereja*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Takaria, G. C. J. (2020). Mengelolah konflik yang terjadi di antara umat Tuhan. *Jurnal Koinonia*, 8(2), 50–57.
- Ulum, M. B., & Utami, P. R. (2022). Resolusi konflik agama berdasarkan budaya Penginyongan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 263–280. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp263-280>